

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka diperlukan untuk menyeleksi masalah-masalah yang dijadikan sebagai topik pembahasan dalam penelitian. Hal ini sangat perlu dilakukan, sebab dalam tinjauan pustaka terdapat teori-teori ataupun konsep-konsep atau generalisasi yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis bagi peneliti. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah :

##### **2.1.1 Konsep Tinjauan Historis**

Tinjauan Historis bila diperhatikan secara seksama, merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari beberapa suku kata yang berbeda, yakni Tinjauan dan Historis. Secara etimologi bila diterjemahkan melalui kamus besar bahasa Indonesia Tinjauan memiliki beberapa pengertian yaitu sebagai hasil temuan, peyelidikan, mempelajari dan sebagainya. (Peter Salim dan Yeny Salim, 2002 : 1621)

Dari pengertian singkat tersebut, tentunya dalam hal ini dapatlah diartikan bahwa “Tinjauan” merupakan suatu pengamatan yang dilakukan guna

mendapat sebuah hasil dari sebuah permasalahan dengan cara melakukan penyelidikan, mempelajari dan sebagainya.

Dalam pengertian selanjutnya mengenai kata “History”, bila ditelusuri melalui etimologi bahasanya merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa eropa yang sebelumnya diadaptasikan melalui kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno “historia” (dibaca Historia), yang dimana kata tersebut memiliki makna sebagai telaahan mengenai sebuah gejala-gejala yang menyangkut individu manusia yang berjalan dalam sebuah urutan kronologis. (Sjamsuddin dan Ismaun, dalam Dadang Supardan. 2011:287)

Sementara itu bila penggunaan istilah History tersebut diartikan kedalam bahasa indonesia, tentunya akan mengacu pada sebuah istilah “Sejarah”. Penggunaan istilah “Sejarah” bagi bangsa Indonesia tentu dipengaruhi oleh sebuah kata yang berasal dari bahasa arab “Syajaratun” (dibaca Syajarah) yang memiliki arti sebagai pohon kayu. Dalam pemaknaan arti tersebut, pengertian pohon yang dapat dianalogikan sebagai sebuah rangkaian dari silsilah kehidupan yang terus berjalan sebagai sebuah ranting ataupun akar pohon yang terus bercabang.

Dalam pengertian secara umum, Sejarah ataupun History tentunya memiliki arti dan makna yang sama, yakni sama-sama menunjukan suatu objek dari suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dimasa lampau. Sejarah juga

merupakan suatu gambaran mengenai sebuah peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan manusia sebagai pusat peristiwa, yang kemudian disusun sebagai sebuah karya ilmiah yang meliputi urutan waktu dan diberikan tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah untuk dipahami. (Hugiono dan P.K Poerwantana, 1987:9)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, baik mengenai arti kata maupun pendapat-pendapat dari berbagai macam sumber, maka dapatlah disimpulkan bahwa Tinjauan Historis merupakan suatu pengamatan yang dilakukan guna mendapatkan sebuah hasil atau jawaban dari sebuah peristiwa yang terjadi dimasa lampau, dengan cara melakukan peyelidikan mengenai fakta-fakta sumber serta mempelajari setiap kronologi peristiwa tersebut dalam sebuah penafsiran dari karya ilmiah.

### **2.1.2 Konsep Pembentukan Penjaga Keamanan Rakyat (PKR)**

Penjaga Keamanan Rakyat atau yang biasa dikenal dengan istilah PKR, merupakan suatu badan pertahanan pemerintah yang telah terbentuk sejak tahun 1945. Terbentuknya PKR sebagai organisasi militer pemerintah, semata-mata merupakan suatu kelanjutan dari dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang telah terbentuk sebelumnya sebagai badan yang menaungi keamanan wilayah.

Dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR), pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai angkatan bersenjata regular melainkan hanya sebagai

perangkat keamanan yang bertugas dalam memelihara keamanan bersama rakyat, sehingga BKR merupakan bagian dari BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang). Namun seiring dengan perkembangannya BKR kini mulai mengembangkan diri sebagai Korps Pejuang Bersenjata. (F. Sugeng Istanto, 1992:131)

Setelah BKR terbentuk, kemudian hadirilah organisasi pertahanan baru yang dikenal dengan istilah Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) yang dimana hampir keseluruhan anggotanya merupakan bekas tentara jepang seperti *Gyu'gun* dan *Heiho*. Berbeda dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR), Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) merupakan salah satu organisasi militer pemerintah yang pada waktu itu hanya dibentuk diwilayah Sumatera khususnya di Sumatera Selatan dan sekitarnya. PKR pada mulanya tidak lebih dari sekedar tempat berkumpul opsir-opsir muda tanpa seragam, anak buah dan tanda pangkat. (Mestika Zed, 2005 : 126)

Di wilayah Lampung, PKR telah terbentuk sejak 25 Agustus 1945 yang pada waktu itu proses pembentukanya dilakukan oleh sejumlah perwira bekas tentara didikan Jepang dan sejumlah tokoh-tokoh pemudah lainnya yang kemudian pembentukan PKR itu meluas keseluruh daerah di Lampung dan merupakan embrio organisasi militer di Lampung. (Dewan Harian Daerah "45, 1994: 138)

Dibentuknya organisasi Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) secara umum di Lampung pada tanggal 25 Agustus 1945, kemudian diikuti dengan dibentuknya Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) Laut pada bulan Oktober 1945 yang berbasis diwilayah Teluk Betung. PKR Laut pada umumnya berisikan para pelaut bekas militer Jepang yang terdiri dari *Kaigun, Heiho, Jawa Unko Kaisha* dan unsur-unsur maritim lainnya yang kemudian mendirikan organisasi kementaraan yang bergerak didalam menjaga wilayah perairan dan fasilitas-fasilitas di sekitar wilayah perairan.

### **2.1.3 Konsep Pasukan Militer**

Pengertian akan makna sebuah Pasukan bila diperhatikan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pasukan memiliki pengertian sebagai sekelompok tentara atau prajurit yang memiliki tugas tertentu sesuai dengan kemampuan dan tugasnya, dan terkadang ditempatkan di posisi terdepan dalam suatu pertahanan. (Peter Salim dan Yeny Salim, 2002 : 1105)

Bila mengacu pada pengertian tersebut, maka pengertian pasukan dalam hal ini dapatlah diartikan, bahwa pasukan merupakan suatu unit tentara ataupun prajurit yang secara teknis terbagi atas beberapa kelas dan golongan yang disesuaikan dengan kemampuannya, dan memiliki tugas sebagai unit pertahanan dalam garis terdepan. Secara sederhana pengertian tersebut juga mengindikasikan bahwa pasukan merupakan sekelompok unit taktis yang dipersenjatai baik oleh suatu kelompok ataupun negara yang memiliki kendali besar atas pasukan militer bentuknya.

Menurut Sayidiman Suryohadiprojo menyebutkan mengenai pengertian istilah militer secara lebih sederhana, bahwa : “Militer sebagai organisasi kekuatan bersenjata yang bertugas didalam menjaga kedaulatan negara” (Sayidiman Suryohadiprojo dalam Conni Rahakundini Bakrie, 2007 : 41)

Bila ditinjau dari beberapa pendapat dan pengertian tersebut, maka dalam hal ini dapatlah sedikit diartikan bahwa istilah “pasukan” tentunya memiliki sebuah keterkaitan dalam istilah militer, sebab dalam hal ini militer merupakan suatu organisasi angkatan bersenjata yang dimiliki oleh sebuah negara yang berfungsi didalam mengelola para prajurit atau serdadu (dalam hal ini adalah *Pasukan*), sebagai alat yang digunakan untuk melaksanakan kepentingan negara.

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, maka dalam hal ini dapatlah sedikit disimpulkan bahwa hubungan antara militer dan pasukan tentunya merupakan suatu hal yang sangatlah logis untuk dihubungkan, dan oleh sebab itulah maka dalam hal ini, prajurit/tentara/ pasukan merupakan suatu unit taktis yang diciptakan oleh sebuah organisasi militer yang tentunya dimiliki oleh sebuah negara.

Menurut pandangan Almos Perlmutter mengenai organisasi militer didalam sebuah negara, dalam buku karangannya yang berjudul “Militer dan Politik”, menyebutkan bahwa dalam suatu organisasi militer dalam sebuah negara,

akan terdapat beberapa jenis-jenis orientasi militer yang dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni prajurit profesional, prajurit pretorian dan prajurit revolusioner. Ketiga jenis orientasi ini muncul sebagai bagian dari adanya reaksi terhadap keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar lingkungannya. (Amos Perlmutter, 2000 : 14)

Sementara itu bila ditelusuri melalui asal usul pembentukannya, nodlinger mengidentifikasikan bahwa pembentukan pasukan militer dapat dibentuk menjadi tiga kelas sosial, yaitu : 1. Kelas atas (high class) 2. Kelas menengah (middle class) 3. Kelas menengah bawah (lower middle class). (Nodliger dalam Indria Samego, 2000 : 40)

Dengan adanya berbagai pendapat dan sumber-sumber mengenai pengertian pasukan, maka dalam hal ini peneliti dapatlah menyimpulkan secara garis besar mengenai pasukan. Pasukan merupakan sekelompok unit taktis militer yang terlatih dan dipersenjatai guna menjalankan fungsi dan tujuannya sesuai dengan organisasi militer yang terdapat didalamnya.

#### **2.1.4 Konsep Pertahanan Laut**

Konsep pertahanan atas laut, tentunya merupakan sebuah konsep yang tercipta dalam usaha untuk mengamankan wilayah perairan dari segala macam ancaman ataupun pelanggaran. Istilah pertahanan laut itu sendiri tentu timbul seiring dengan adanya konsep mengenai pengertian pertahanan itu sendiri secara umum. Munculnya konsep pertahanan ini, tentunya dapat

dicerminkan dari keberadaan sebuah negara. Pertahanan dalam sebuah negara, terkadang memiliki sebuah keterkaitan yang cukup kuat. Sebab dalam hal ini pertahanan dalam sebuah negara lebih dititik beratkan pada aktivitas didalam mengamankan wilayah teritorialnya. Dalam hal ini, pertahanan memiliki sebuah tujuan yang tidak sederhana, sebab pertahanan tidaklah lagi terbatas pada mempertahankan suatu integritas wilayah nasional terhadap segala bentuk ancaman, namun lebih ditujukan didalam mempertahankan segala ideologi dan segala nilai-nilai kehidupan dari sebuah bangsa yang ada didalamnya. (Daed Joesoef, 1973 : 138)

Upaya pertahanan seperti itu, tentunya merupakan suatu proses didalam menghadapi kemungkinan dari sebuah serangan atau invansi dari luar yang dilakukan dengan cara membangun serta membina daya kekuatan tangkai negara sebuah bangsa sehingga mampu menangkai setiap ancaman yang berasal dari luar negeri, dalam bentuk dan wujud apapun. (Thontowi Amsia, 2011 : 61)

Oleh sebab itu maka dalam hal ini dapatlah sedikit disimpulkan bahwa pertahanan merupakan sebuah cara bagi suatu kelompok tertentu didalam mempertahankan diri ataupun kepemilikan tertentu dari segala macam ancaman-ancaman yang di lakukan oleh musuh.

Pengertian selajutnya yaitu mengenai istilah laut. Laut merupakan salah satu wilayah yang dimana selalu mendapatkan perhatian disetiap Negara-negara didunia. Laut selain sebagai unsur dari alam, tentunya memiliki sejumlah potensi yang besar bagi kehidupan manusia. Menurut Anugrah Nontji dalam bukunya yang berjudul “Laut Nusantara” menyebutkan bahwa laut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan Antara lain :

1. Transportasi
2. Perikanan
3. Pertambangan
4. Bahan Baku Obat-obatan
5. Energi
6. Rekreasi dan Pariwisata
7. Pendidikan dan Penelitian
8. Konservasi Alam
9. Pertahanan Keamanan

(Anugrah Nontji, 1987 : 6, 8)

Bila diperhatikan secara sepintas menurut pandangan Anugrah Nontji, laut secara garis besar juga berperan sebagai penentu didalam pertahanan serta keamaan dari sebuah Negara. Laut bagi setiap negara kepulauan tentunya merupakan suatu wilayah yang sangat penting, mengingat laut merupakan wilayah yang dapat dijadikan sebagai pengamanan dan penjaga keutuhan wilayah dari segala macam ancaman.

Sementara itu bila diperhatikan dari segi pertahanan dan keamanannya, Menurut Sayidiman Suryohadiprojo dalam bukunya “Si Vis Pacem Para Bellum”. menyebutkan : Laut merupakan bagian penting dari perang dan strategi baik itu serangan atau pertahanan. Lautan diperluakan untuk dapat

membawa kekuatan perang didaerah-daerah lain ke seberang lautan.  
(Sayidiman Suryohadiprojo, 2005:102)

Dalam pernyataan tersebut sudah sangat jelas bahwa pertahanan laut merupakan sebuah bagian dari penguasaan wilayah yang sangat strategis untuk dikuasai ataupun di pertahankan bagian wilayahnya, sebab dalam hal inilah sebuah Negara kepulauan dapatlah bertahan dan menyempurnakan bagian kedaulatan wilayahnya.

Pentingnya potensi laut dalam pertahanan, tentunya juga didukung dengan adanya pandangan para ahli mengenai potensi wilayah perairan tersebut. Menurut pandangan ilmu maritim yang menyatakan bahwa penguasaan lautlah yang menjadi dasar terakhir bagi kekuasaan negara. (T.B Simatupang, 1981 : 202)

Hal tersebut tentunya didukung pula dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh Sir Walter Raleigh yang menyatakan bahwa “Siapa yang menguasai Lautan, dia menguasai kekayaan-kekayaan dunia dan dengan itu dia menguasai dunia itu sendiri”. Pernyataan tersebut tentu bukanlah sebuah anggapan semata. Mengingat dalam hal ini laut tentunya merupakan sebuah pintu gerbang dalam mencapai dunia baru. Pendapat yang disampaikan tersebut, juga didukung dengan adanya pendapat dari seorang perwira angkatan laut Amerika Serikat yaitu Laksamana Muda Mahan,

menurut mahan menerangkan tentang peranan lautan, bahwa pemakaian dan penguasaan lautan mempunyai pengaruh yang menentukan terhadap sejarah negara. Hal ini tentunya telah dibuktikan dari sejumlah catatan-catatannya mengenai kejayaan-kejayaan dari berbagai bangsa didunia yang menggunakan penguasaan laut dalam membentuk armada perangnya. (T.B Simatupang, 1981 : 203)

Dari berbagai sumber serta beberapa pendapat-pendapat ahli mengenai pertahanan laut, maka dalam hal ini peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa pertahanan laut merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang atau negara didalam mengamankan wilayah perairanya dari segala macam ancaman yang timbul dari berbagai pihak tertentu.

#### **2.1.5 Konsep Organisasi Militer**

Organisasi Militer merupakan sebuah istilah yang sering dimunculkan untuk menggambarkan sebuah kekuatan militer yang terstruktur dan terencana. Organisasi Militer cenderung dimiliki oleh sebuah Negara maupun penguasa tertentu. Menurut pandangan Amos Perlmutter mengenai Organisasi Militer, dalam buku karanganya yang berjudul “Militer dan Politik”, menyebutkan bahwa organisasi militer adalah sebuah ikatan persaudaraan dan persekutuan sekaligus alat kekuasaan dan birokrasi (Almos Perlmutter, 2000 : 9)

Bila diperhatikan mengenai pengertian tersebut maka dalam hal ini, organisasi militer dapat diartikan sebagai sebuah himpunan ataupun perkumpulan individu yang dapat digerakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam memperoleh kekuasaan. Selanjutnya mengenai perkembangan dari sistem pengorganisasiannya, menurut Beisheline menjelaskan pengorganisasian militer merupakan sebuah proses didalam membuat prosedur-prosedur, faktor-faktor dan struktur organisasi dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. (Biesheline dalam C. Rahakundini Bakrie, 2007 : 22)

Sementara itu bila ditelusuri melalui asal usul pembentukannya, nodlinger mengidentifikasi bahwa pembentukan organisasi militer dapat dibentuk menjadi dua katagori, yaitu berdasarkan pembentukannya militer berasal dari faktor-faktor berikut : a). dibentuk oleh rezim kolonial. b). terbentuk pada masa geriliya/revolusi dan c). terbentuk sesudah kemerdekaan. Sementara itu berdasarkan asal usul kelas sosialnya meliputi : 1. Kelas atas (high class) 2. Kelas menengah (middle class) 3. Kelas menengah bawah (lower middle class). (Nodliger dalam Indria Samego, 2000 : 40)

Bila diperhatikan melalui beberapa pemaparan yang diungkapkan oleh para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi militer merupakan sebuah perkumpulan yang dibentuk sebagai alat untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu dan dalam proses pengorganisasiannya pun banyak menyesuaikan dengan kondisi sekitar.

### **2.1.6 Konsep Kolonialisme dan Imperialisme Belanda**

Kolonialisme berasal dari kata *koloni* yang memiliki pengertian menahan sebagian masyarakat di luar batas atau lingkungan daerahnya. Pengertian dari kolonialisme itu sendiri cenderung berkaitan dengan adanya suatu sistem imperialisme yang tentunya dilakukan oleh para pelaku kolonial. Pengertian tersebut bila disejajarkan dengan pendapat yang disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Julianto dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia” disebutkan bahwa :

“Kolonialisme adalah rangkaian nafsu suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain di bidang politik, social, ekonomi dan kebudayaan dengan jalan :

- a. Dominasi Politik
- b. Eksploitasi Ekonomi
- c. Penetrasi Kebudayaan. (C.S.T Kansil dan Julianto, 1977 : 7)

Dari kedua pengertian tersebut, tentu dapatlah sedikit disimpulkan bahwa kolonialisme merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh suatu negara yang memiliki kemampuan kuat didalam mengeksploitasi atau memberikan suatu pengaruh tertentu kepada suatu wilayah yang telah dijadikan incarannya. Sifat kolonialisme tentu merupakan suatu hal yang tak dapat terlepas dari adanya sebuah sistem imperialisme, yang dimana sistem tersebut dapatlah digambarkan sebagai sebuah penjajahan atau pemerasan suatu kaum yang dianggap lemah.

Pengertian Imperialisme bila didasarkan atas pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, menyebutkan : Imperialisme pada pokoknya berarti politik eksploitasi terhadap bangsa lain untuk kepentingan si Imperialis (mother contry). (C.S.T Kansil dan Julianto, 1977 : 8)

Menurut Smith, dalam penggunaan istilah imperialisme dapat digunakan kedalam empat pengertian yang saling berbeda, yakni :

1. Imperialisme sebagai ekspansi ekonomi
2. Imperialisme sebagai pendudukan orang lain (other)
3. Imperialisme sebagai konsep, semangat dan berbagai macam perwujudan.
4. Imperialisme sebagai suatu bidang pengetahuan diskursif

(Makinuddin dan Tri Handiyanto Sasongko, 2006 : 8)

Dengan adanya pengertian mengenai konsep-konsep kolonialisasi dan Imperialisme, maka dalam hal ini penulis dapatlah menyimpulkan secara sederhana bahwa konsep kolonialisme dan Imperialisme merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk membentuk suatu koloni-koloni baru yang nantinya akan memberikan suatu keuntungan bagi Negara induk.

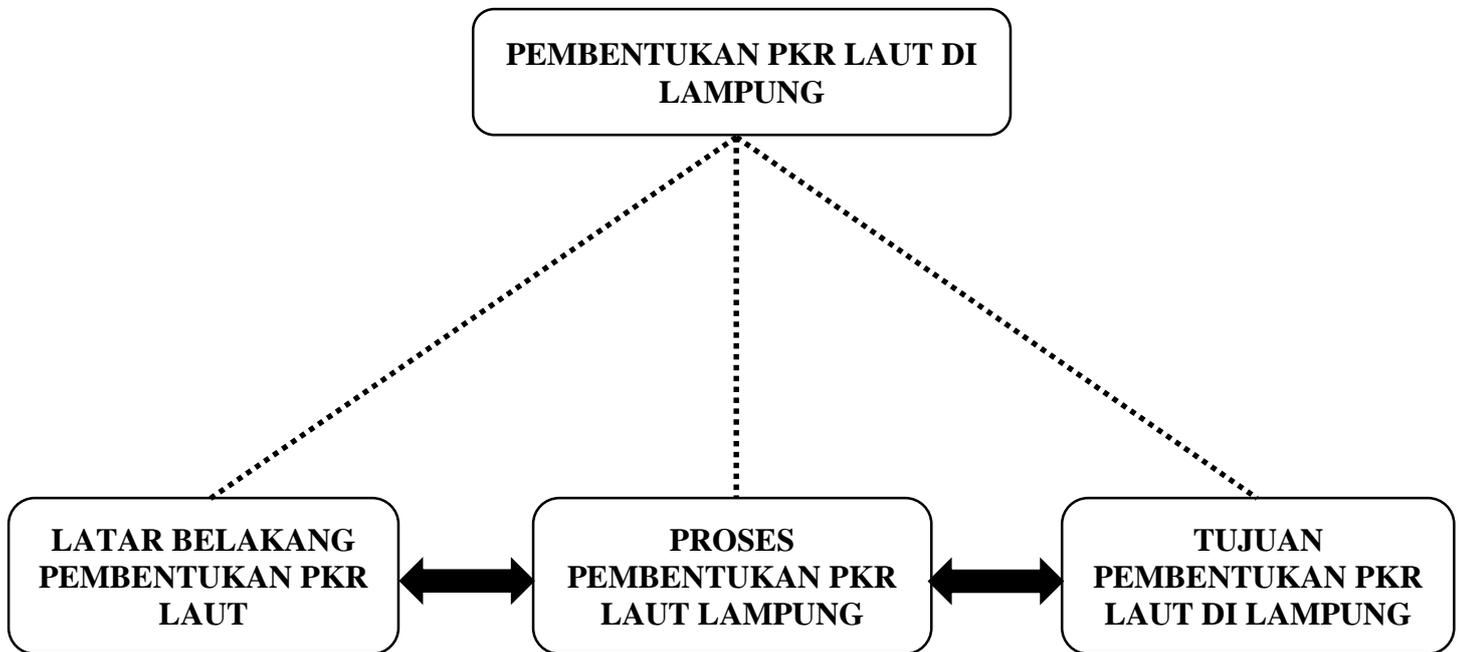
## 2.2 Kerangka Pikir

Peran pasukan pertahanan laut bagi Indonesia, tentu tidaklah hanya sebatas mengamankan wilayah perairan di Indonesia saja, melainkan juga bertindak sebagai alat dalam mengamankan segala unsur-unsur negara. Hal ini tentu akan dapat terlihat dengan jelas, apabila pemahaman tersebut di sadingkan dengan perjalanan sejarah awal proses Kemerdekaan bangsa Indonesia yang dimana dimasa ini, peran pasukan pertahanan laut tentu sangatlah menentukan bagi kelanjutan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini pun disebabkan dengan upaya bangsa Belanda ke Indonesia untuk menduduki wilayah jajahannya kembali.

Adanya Agresi Militer Belanda inilah, yang kemudian mendorong sikap pemerintah untuk membentuk suatu Badan Keamanan Rakyat (BKR) disetiap daerah. Dengan hadirnya BKR dan PKR inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari berbagai macam devisi-devisi militer yang terbagi atas devisi Darat, Laut dan Udara.

Di Sumatera khususnya di wilayah Lampung, dibentuk BKR dan PKR tentu merupakan sebuah strategi yang sangat tepat, mengingat wilayah Lampung sebagai tempat persinggahan yang ideal serta sebagai jalur masuk lintas Benua dan Samudra. Dengan dibentuknya PKR laut di Lampung, maka sudah tepatlah taktik dan strategis pemerintah dalam melindungi jalur lintas perairan wilayah Indonesia.

### 2.3 Paradigma



Keterangan :

- ..... : Garis Proses  
↔ : Garis Hubungan atau Masalah

## REFERENSI

- Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Perss. Hal : 1621.
- Dadang Supardan. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial : Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta : PT. Bumi Akasara. Hal : 287.
- Hugiono dan P.K Poerwanatana. 1987. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta : PT. Bina Aksara. Hal : 9.
- F. Sugeng Istanto. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta : ANDI OFFSET. Hal : 131.
- Mestika Zed. 2005. *Gyúgun Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia. Hal : 126
- Dewan Harian Daerah "45. 1994. *Sejarah Perjuangan Daerah Lampung Buku I*. CV. Bandar Lampung : Mataram. Hal : 138.
- Peter Salim dan Yenny Salim. *op. cit.* Hal : 1105
- Conni Rahakundini Bakrie. 2007. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hal : 41.
- Almos Perlmuter. 2000. *Militer dan Politik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal : 14.
- Indria Samego. 2000. *TNI di Era Perubahan*. Jakarta : Erlangga. Hal : 40.
- Daoed Joesoef. 1973. *Dua Pemikiran Tentang Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional*. Jakarta : Yayasan Proklamasi dan CSIS. Hal : 138.
- Thontowi Amsia. 2011. *Perspektif Kewarganegaraan dalam Ketahanan Nasional*. Bandar Lampung : \_\_\_\_\_. Hal : 61.
- Anugrah Nontji. 1987. *Laut Nusantara*. Jakarta : \_\_\_\_\_. Hal : 6, 8.
- Sayidiman Suryohadiprojo. 2005. *Si Vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal : 102.

T.B Simatupang. 1981. *Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai*. Jakarta : Sinar Harapan. Hal : 202.

*Ibid.* Hal : 203.

Almos Perlmutter. *op. cit.* Hal : 9.

Conni Rahakundini Bakrie. *op. cit.*, Hal : 22.

Indria Samego. *op. cit.* Hal : 40

C.S.T Kansil dan Julianto. 1977. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta : Erlangga. Hal : 7.

*Ibid.* Hal : 8.

Makinuddin dan Tri Handiyanto Sasongko. 2006. *Analisis Sosial : Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*. Bandung : Yayasan AKATIGA. Hal : 8.